

Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das

Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat
 Pembangunan Daerah Berbasis Pertanian
 Komoditas Perikanan
 Proceedings of the 2nd International Conference on Fundamental Rights, I-COFFEES 2019, 5-6 August 2019, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air Sebagai Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem
 Inovasi pengolahan dan pengelolaan produk unggulan berbasis ekonomi digital di daerah tertinggal
 Pengelolaan Komoditas Hortikultura Unggulan Berbasis Lingkungan
 Pembangunan Inklusif di Kota Pesisir Luar Jawa Berbasis Kearifan Lokal
 Pengembangan Perikanan, Kelautan, dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat Volume II
 AGRIBISNIS : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian
 PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH 2021
 Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Terpadu untuk Ketahanan Nasional
 Covid-19, Perubahan Iklim dan Akses Rakyat terhadap Keadilan
 I-COFFEES 2019
 Studi Kasus Kota Ampenan, Jerowaru, Makassar, dan Padang Pariaman
 Prospek Pengembangan Potensi Sumberdaya Kelautan Madura Kepulauan
 Mewariskan Kota Layak Huni
 Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah
 Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Rawa
 Pendekatan Sistem
 Ketahanan Wilayah di Kepulauan Tengah Nusantara
 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Konsep dan Teori)
 Dalam Mencapai Indonesia Maju 2045
 Realitas Pangan dan Perkebunan Saat Ini dan Prospeknya menuju Swasembada Berkelanjutan
 Kasus di Sebagian Pesisir Pemalang
 Evidence-Based Policy: dari Riset ke Kebijakan: Volume III Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Rakyat
 Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI
 Menjaga Momentum Pertumbuhan Indonesia Edisi 2014
 Kearifan Kebijakan dan Keberlanjutan
 Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan
 Evidence-Based Policy: dari Riset ke Kebijakan Volume II Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
 Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 Analisis Bencana Untuk Menunjang Pembangunan Daerah
 Arah Pengembangan Kawasan
 Kebijakan Pembangunan Perkotaan
 Biologi Lingkungan

Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das Downloaded from archive.imba.com by guest

JORDAN COPELAND

Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat PT Penerbit IPB Press
 Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelolaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Pembangunan Daerah Berbasis Pertanian UNJ PRESS
 PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAIGlobal Aksara Pers
Komoditas Perikanan Universitas Brawijaya Press
 Buku dengan judul “Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI” terdiri atas 6 (enam) chapter. Keenam chapter tersebut antara lain “Overview Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, “Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Perbatasan”, “Penentuan Lokasi Prioritas Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan”, “Model Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan”, dan “Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan Merauke, Papua, dan Sumberdaya Lahan Wilayah Perbatasan Merauke, Papua”. Keenam chapter tersebut dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, tetap mengacu ke dalam konsep pengelolaan wilayah perbatasan NKRI. Buku dengan judul “Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI” mengawali pembahasan mengenai Kebijakan Pengelolaan Perbatasan NKRI. Kebijakan pemerintah dinilai sangat menentukan kesejahteraan warga masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut dapat berupa produk perencanaan (RTRW, MP3EI, MP4B) dan status kawasan perbatasan dalam RTRWN (PKSN, PKN, PKW, PKL, KPE, KEK). Chapter kedua buku ini mengkaji mengenai Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Perbatasan. Di bagian ini, sumberdaya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan wilayah perbatasan. Namun, sumberdaya manusia yang mumpuni tidak akan berjalan dengan baik jika pengembangan infrastruktur lumpuh/mati. Oleh karena itu, peranan antara sumberdaya

manusia yang mumpuni dengan infrastruktur wajib memiliki sinergi yang sejalan sehingga pertumbuhan di kawasan perbatasan dapat berlangsung secara optimal dan maksimal. Chapter ketiga membahas mengenai Penentuan Lokasi Prioritas Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan. Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan hendaknya ditentukan berdasarkan kemampuan potensi sumberdaya alam di wilayah itu sendiri, bukan dari kebutuhan sesaat semata. Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan perlu mendapatkan peranan lebih dari pemerintah pusat. Hal tersebut dimaksudkan agar negara tetangga tidak memberikan pengaruhnya di wilayah perbatasan NKRI. Chapter keempat membahas mengenai Model Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan. Model pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan diupayakan berdasarkan potensi sumberdaya alam di daerah sendiri. Strategi untuk mengembangkan potensi tersebut dapat diupayakan melalui input produksi, pengolahan produksi, pemasaran, penunjang, kondisi sosial ekonomi, dukungan dan kebijakan, dan persepsi masyarakat. Chapter kelima mengkaji mengenai Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan Merauke, Papua. Chapter ini mengangkat mengenai wilayah Kabupaten Merauke. Kondisi geografis yang dipaparkan berupa kondisi fisik dan kondisi sosial. Kondisi fisik dapat berupa kondisi iklim, geologi, penggunaan lahan, lereng, dan ketinggian. Kondisi sosial dapat berupa kepadatan penduduk, pendidikan, dan mata pencaharian. Sumberdaya Lahan Wilayah Perbatasan Merauke, Papua merupakan pembahasan terakhir buku ini. Wilayah kajian yang diangkat adalah Distrik Oliokobel, Distrik Sota, Distrik Merauke, dan Distrik Naukenjerai. Tiap-tiap kajian dikaji berdasarkan kondisi sosial dan kondisi fisik wilayah.
Proceedings of the 2nd International Conference on Fundamental Rights, I-COFFEES 2019, 5-6 August 2019, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia PSA IPB
 Buku Inovasi Pengolahan dan Pengelolaan Produk Unggulan di Daerah Tertinggal yang disusun dari bahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini berisi empat bab, yaitu bab pendahuluan, bab permasalahan, bab pengolahan dan pengelolaan produk unggulan, dan bab penutup. Bab I membahas tentang latar belakang mengenai pentingnya inovasi pengolahan dan pengelolaan produk unggulan berbasis ekonomi digital di daerah tertinggal. Berbagai permasalahan yang ada di masyarakat daerah tertinggal merupakan hal penting yang membutuhkan perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu faktor yang menghambat pengembangan daerah tertinggal adalah terbatasnya sosialisasi mengenai pemanfaatan ekonomi digital yang saat ini sudah sangat memungkinkan untuk dijangkau sehingga sumber daya alam atau potensi-potensi yang berasal dari kekayaan alam Indonesia bisa mendukung pergerakan perekonomian

masayarakat secara khusus, negara secara umum. Selain latar belakang juga dijelaskan mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan daerah tertinggal dan landasan konseptual yang terdiri dari BUMDes, Koperasi, dan UKM.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UGM PRESS
 Keterbatasan lahan untuk pembangunan khususnya di kawasan pesisir tak jarang membawa pada proyek reklamasi. Secara lingkungan, proyek reklamasi ini dapat menyebabkan kehancuran ekosistem seperti hilangnya keanekaragaman hayati sementara secara sosial dapat menyebabkan tergesurnya nelayan tradisional dari sumber-sumber kehidupannya. Mengingat potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh proyek reklamasi tersebut, maka sangat penting untuk memerhatikan hukum lingkungan dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir. Buku ini membicarakan terkait hukum lingkungan dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir. Ada tiga materi utama yang disampaikan. Pertama, terkait kebijakan pertanahan dalam pembangunan di wilayah pesisir. Kedua, terkait penataan pertanahan di wilayah pesisir. Ketiga, terkait perlindungan hak masyarakat pesisir atas lingkungannya. Dengan membaca keseluruhan isi buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran dan pemahaman bagaimana kebijakan pertanahan di wilayah pesisir semestinya dilakukan; sehingga dalam pembangunan di wilayah pesisir—seperti melalui proyek reklamasi—aspek lingkungan dan sosial juga tidak lupa diperhatikan di samping aspek-aspek lain. Buku ini dapat dibaca oleh para pengajar dan mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum. Selain itu, dapat pula dibaca oleh mereka yang bergiat di bidang advokasi lingkungan dan para pembuat kebijakan.
Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air Sebagai Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem PT Penerbit IPB Press
 Kami berharap bahwa berbagai temuan hasil riset yang disajikan dalam buku ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian di masa yang akan datang. Adapun hasil-hasil penelitian yang telah siap diimplementasikan, baik dalam dunia industri, rumah tangga, ataupun dalam perumusan kebijakan publik, kami harapkan dapat menyumbangkan nilai maslahat yang besar bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, kami sangat mendorong komunikasi dan kerja sama yang nyata antara para akademisi, pelaku bisnis, dan penyusun kebijakan publik yang dikenal sebagai segi tiga ABG (academicia, business, and government). Tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik di antara tiga kelompok pelaku tersebut mustahil dihasilkan nilai tambah yang bermanfaat besar bagi masyarakat luas.
Inovasi pengolahan dan pengelolaan produk unggulan berbasis ekonomi digital di daerah tertinggal Muhammadiyah University Press
 Buku ini berisi tentang perkembangan konsep atau paradigma

sistem dan usaha agribisnis, mulai dari muncul/lahir, berkembang, populer, menuju kematangan (maturity), dan implementasi dalam perekonomian nasional. Dengan membaca buku ini, maka pembaca dapat memahami dan mengerti konteks lahir dan berkembangnya pemikiran atau konsep atau paradigma sistem dan usaha agribisnis di Indonesia.

Pengelolaan Komoditas Hortikultura Unggulan Berbasis Lingkungan PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR, BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Buku ini membahas mengenai pentingnya pengelolaan wilayah terutama dengan menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan. Informasi karakteristik fisik wilayah pesisir di sebagian Kabupaten Pemalang yang diperoleh sebagai upaya pengembangan kawasan yang seimbang untuk mempertahankan kondisi ekosistem wilayah. Dalam buku ini, dijelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan arahan pengembangan kawasan di sebagian pesisir Pemalang, meliputi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, analisis sumber daya lahan, zonasi kepebisiran, dan elemen risiko bencana. Dengan penentuan arahan ini diharapkan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan sustainability dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Inklusif di Kota Pesisir Luar Jawa Berbasis Kearifan Lokal UGM PRESS

Ekonomi Pembangunan dalam kajian Strategi dan Kebijakan ini, merupakan suatu mata rantai dalam menjaga keseimbangan sistem keuangan, khususnya untuk mencapai stabilitas keuangan dan pertumbuhan perekonomian, penyusunan kegiatan perekonomian dalam bentuk strategi pembangunan menjadi dasar untuk penerapan kebijakan aktivitas perekonomian, sehingga laju gelombang siklus keuangan melalui tekanan variabel ekonomi dapat terkontrol dengan baik, tentunya berdasarkan aktivitas sektor perbankan yang memiliki fungsi intermediary dalam sistem keuangan nasional. Pada buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, yaitu : Bab 1 Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional Bab 2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Bab 3 Permasalahan Pembangunan Ekonomi Bab 4 Hubungan Ekspor Dan Pembangunan Ekonomi Bab 5 Struktur Perekonomian Negara Maju dan Berkembang Bab 6 Proses Pembangunan Dalam Perekonomian Bab 7 Aspek Perdagangan Internasional dalam Pembangunan Ekonomi Bab 8 Pembangunan Ekonomi Internasional Bab 9 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Pengembangan Perikanan, Kelautan, dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat Volume II Forum Pemuda Aswaja

Dalam proses pembangunan ekonomi, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah sangat berbeda. Sehingga dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi regional yang tidak bisa dihindari. Bagi daerah yang sebelumnya sudah membangun sarana dan prasarana untuk memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi maka pendapatan daerahnya juga meningkat seiring pembangunan. Permasalahan-permasalahan di atas, sering kali dialami oleh negara-negara berkembang yang sedang membangun, khususnya negara Indonesia, contohnya: masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pada dasarnya, negara-negara sedang berkembang sangat membutuhkan investasi. Tujuan investasi adalah mempercepat laju pembangunan di negara tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana naiknya pendapatan yang disebabkan oleh produk perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah juga membuat pertumbuhan ekonomi negara mengalami pertumbuhan.

AGRIBISNIS : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian Kencana

Sektor perikanan dalam kegiatan ekonomi nasional menjadi salah satu pilar utama dengan kontribusi cukup besar. Kekayaan alam dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan pesisir beserta gugusan pulau kecil di Indonesia memiliki makna yang strategis bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini masih sebatas pada kegiatan eksplorasi ikan tangkap yang kemudian di ekspor ke negara sekitar. Keunikan wilayah pesisir dan deretan pulau kecil di Indonesia belum dipandang sebagai potensi utama dalam menarik investasi dalam pengembangan dan memajukan pesisir sebagai destinasi unggulan berkelas dunia dengan berbagai aktivitas masyarakat lokal dan daya tarik sumber daya alam di dalamnya. Pesisir merupakan kawasan peralihan, tempat bertemunya lautan dan daratan, yang menghubungkan ekosistem darat dan laut. Sebagai kawasan peralihan ini, kekayaan dari ekosistem dan laut menjadi ciri khas kekayaan utama yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai ancaman kerusakan karena aktivitas masyarakat. Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Buku dengan judul "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" ini memberikan informasi terkait potret pesisir, isu strategis, prinsip dasar pengelolaan pesisir, kehidupan sosial masyarakat nelayan, zonasi pemanfaatan ruang pesisir, kerusakan lingkungan pesisir,

dampak perubahan iklim pada pengelolaan pesisir, valuasi ekonomi ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Harapannya buku ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang ingin lebih memahami "bagaimana mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil".

PENGLOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UGM PRESS

Buku ini menyajikan hal-hal dasar tentang komoditas perikanan, mulai dari jenis-jenis komoditas perikanan hingga yang dilakukan oleh Negara-Negara besar yang banyak berhasil dibidang bisnis komoditas perikanan di dunia. Dengan bahasa yang jelas, penulis merangkai teori dan fakta dalam perdagangan komoditas perikanan. Ditengah kelangkaan tersedianya buku yang membahas komoditas secara lebih khusus komoditas perikanan, kehadiran buku ini dapat menjadi alternatif dasar yang dapat digunakan mempelajari lebih lanjut beberapa topik yang terkait dengan komoditas perikanan, seperti manajemen agribisnis perikanan, pemasaran hasil perikanan, koperasi perikanan dan lainnya. Sebuah buku yang layak dibaca oleh para mahasiswa, peneliti maupun masyarakat.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH 2021 PT Penerbit IPB Press

Buku ini merupakan pengembangan dari laporan akhir penyusunan studi daerah rawan bencana di Kabupaten Batang yang merupakan kerja sama penelitian antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Buku ini membahas tentang analisis bencana dalam menunjang pembangunan daerah dengan studi kajian di Kabupaten Batang. Terdapat empat bencana utama yang paling signifikan terjadi dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Batang, yakni banjir sungai, longsor lahan, erosi pantai, dan rob. Dalam buku ini, dijelaskan parameter-parameter yang diperhitungkan dalam menentukan tingkat bencana yang ada di Kabupaten Batang. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, disusun pemetaan bahaya di Kabupaten Batang, yakni bahaya banjir sungai, longsor lahan, erosi pantai, dan rob yang dapat dijadikan sebagai basis data spasial daerah rawan bencana. Informasi daerah rawan bencana tersebut akan diintegrasikan dalam suatu sistem informasi geografis yang dapat dijadikan basis data spasial sehingga mudah diimplementasikan. Informasi daerah rawan bencana ini merupakan hasil identifikasi, pemetaan, dan analisis menggunakan beberapa data spasial, seperti data penginderaan jauh satelit, peta digital, maupun survei langsung di lapangan. Sebagai pelengkap hasil identifikasi, pemetaan, dan analisis, dilakukan kompilasi data kejadian bencana alam dari berbagai dinas, instansi, dan masyarakat. Informasi daerah rawan bencana yang dihasilkan, terintegrasi dan tersusun dalam satuan unit pemetaan dengan batasan parameter yang cukup jelas, kemudian menghasilkan luaran akhir yang berupa informasi spasial berupa peta.

Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Terpadu untuk Ketahanan Nasional Universitas Brawijaya Press

Sailus dan Poleonro. Setidaknya sebanyak 200 juta penduduk Indonesia sama sekali belum pernah mendengar kedua nama tersebut sepanjang hidup. Lalu kami, 28 orang dengan semangat tinggi dan motivasi memuncak berhimpun. Memupuk ketulusan bersama. Kemudian memahami bahwa Kepulauan Tengah Nusantara, puseran poros maritim dunia ini hidup diliputi ironi. Inilah cerita kami, saat belajar mengabdikan. Lima puluh hari belajar tentang kehidupan di jantung kepulauan Indonesia. Yang dihantui bayang-bayang kerentanan dari kepala sampai ujung kaki. Setulus Sailus adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Tim KKN-PPM UGM Liukang Tangaya yang terdiri atas dosen, mahasiswa, pemuda, masyarakat, organisasi, dan mitra yang mendukung terbukanya akses terhadap ruang data dan informasi di Kepulauan Tengah Nusantara, khususnya di Pulau Sailus . Melalui buku ini, harapannya makin banyak masyarakat yang akan ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah yang ada di KepulauanTengah Nusantara.Temukan kami di Instagram @setulussailus.

Covid-19, Perubahan Iklim dan Akses Rakyat terhadap Keadilan Global Aksara Pers

Buku ini terdiri dari 12 bab yang membahas tentang bagaimana pengaruh sektor kepariwisataan bagi pembangunan di Indonesia. Setiap bab memiliki keunikan tersendiri mendalam dan tajam tentang berbagai proses baik dalam level mikro, meso dan makro. Bab 1 berbicara tentang bagaimana menggali potensi wisata berbasis spasial. Pada bab 2, membahas tentang bagaimana peran masyarakat dalam membangun desa wisata. Indonesia sebagai negara agamais, menjunjung tinggi nilai agama, digambarkan dalam bab 3 dengan judul Isu, Konsep, dan Implementasi Bisnis Wisata Halal. Saat bab 4, pembaca dihantarkan pada isi terkait dengan Tradisi Perkawinan Adat Bangka sebagai salah satu Potensi Daya Tarik Wisata. Ulasan tentang teknis dan metode partisipatif diungkapkan dalam bab 5, lewat judul Asset Based Community Development (ABCD) dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Bab 6 berbicara tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat dan Budaya. Saatnya waktu virtual, dibahas pada bab 7, Virtual Tour sebagai Alternatif Wisata. Bab 8 berbicara tentang Storytelling dalam

penyajian kemasan produk desa wisata. Indonesia dikelilingi banyak negara, dibahas secara mendalam pada bab 9, wajah baru perbatasan Indonesia. Bab 10 tentang perencanaan penerapan program cleanliness, health and safety (CHS) pada destinasi wisata dalam new normal di Indonesia. Bab 11, tentang Penguatan Tata Kelola Pariwisata Kabupaten Bangka dalam Perspektif Collaborative Governance. Terakhir, bab 12 menjelaskan tentang Kawasan Perbatasan. Yang merupakan kawasan strategis yang memiliki peran dalam menjaga integritas wilayah negara.

I-COFFEES 2019 Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

Judul : PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Konsep dan Teori)

Penulis : Tamaulina Br. Sembiring, S. H., M. Hum., Ph.D Ukuran :

14,5 x 21 cm Tebal : 115 Halaman No ISBN : 978-623-5687-88-9

SINOPSIS Bab pertama membahas tentang Pendahuluan. Bab kedua membahas tentang Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan yang meliputi Pengertian Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Prinsip Dasar Pembangunan berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, dan Landasan Hukum Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan. Bab ketiga membahas tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yang meliputi Prinsip-Prinsip Hukum Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Ekosistem DAS dan Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bab keempat membahas tentang DAS, Garis Sempadan Sungai dan Kelestarian Lingkungan yang meliputi Ekosistem DAS, Ekosistem Tanah, Asas-Asas Pengelolaan Daerah Aliran Sempadan Sungai (DAS). Bab kelima membahas tentang Tanah Di Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai yang meliputi Maksud Tanah di Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai, Tujuan Tanah di Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai, Fungsi Tanah di Kawasan Daerah Aliran Sempadan Sungai, Pentingnya Pengelolaan DAS Terpadu dan Sumber Daya Alam (SDA) Lahan (Tanah). Bab keenam membahas tentang Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Autonomi Daerah yang meliputi Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Meningkatkan Peranan Institusi Pengelolaan DAS, Dominasi (Determinisme) Lingkungan pada Kehidupan Manusia, Teori Tentang Kesadaran Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori).

Studi Kasus Kota Ampenan, Jerowaru, Makassar, dan Padang Pariaman Guepedia

Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan sekelumit upaya untuk menjawab masalah kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan kita. Secara akademis, kehadiran buku ini juga untuk menggugah kajian berbagai pihak tentang upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan kita agar menjadi kekuatan ekonomi bangsa yang kita kenal sebagai bangsa maritim. Buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan dan landasan dalam kajian dan penyusunan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan pada era otonomi daerah oleh pihak-pihak yang berpengharapan besar untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan nasional secara berkelanjutan.

Prospek Pengembangan Potensi Sumberdaya Kelautan Madura Kepulauan UGM PRESS

Buku ini memaparkan relevansi kajian kebijakan pembangunan perkotaan dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya sebagai bagian dari kajian analisis kebijakan secara substantif, yaitu keseluruhan proses pembangunan perkotaan. Pembahasan dimulai dengan membentangkan isu strategis pembangunan perkotaan dan ketersediaan infrastruktur perkotaan di dalamnya mencakup permasalahan demografi, hunian, urbanisasi, transportasi, ketersediaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan permasalahan pelayanan publik lainnya.

Mewariskan Kota Layak Huni UHO EduPress

Wilayah pesisir merupakan peralihan darat dan laut. Ruang lingkup wilayah pesisir meliputi ruang lautan yang masih terjadi pengaruh aktifitas daratan, dan ruang daratan dipengaruhi oleh aktifitas di lautan. Sumber daya laut dan pesisir perlu dikelola dengan bijak, sehingga menjadi tumpuan sektor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan wilayah pesisir, menyebabkan tekanan ekologis terhadap keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengumpulkan informasi dalam bentuk buku. Informasi yang dikumpulkan besumber hasil kajian pustaka, diskusi dan wawancara dan bahkan dari berbagai hasil-hasil penelitian terdahulu. Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu: Bab 1. Mangrove Sebagai Green Belt Wilayah Pesisir Bab 2. Potensi Material Alternatif untuk Infrastruktur Berkelanjutan Bab 3. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir Bab 4. Potensi Budidaya Perikanan di Wilayah Pesisir Bab 5. Pembangunan Tranportasi Berbasis Maritim Bab 6. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut dalam kerangka Infrastruktur Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami Bab 7. Inovasi Usaha Masyarakat Pesisir dalam Mendukung Ketahanan Pangan Bab 8. Dampak Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem di Kawasan Pesisir dan Laut Bab 9. Satwa Liar dan Medik Konservasi untuk Wilayah Pesisir Bab 10. Pemanfaatan Teknologi Membran dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Air dan Energi

Penerbit Adab

The International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES)

is an international conference organized by the Faculty of Law, Universitas Lampung, to be an international scientific forum for researchers, academics, and practitioners. The first I-COFFEES were held in 2018 at the Novotel Hotel, Bandar Lampung, Indonesia. In 2019, the Second I-COFFEES were held on 5-6

August at the Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia. "Fundamental Rights" has been chosen for the main theme of the Second I-COFFEES with a focus field on Law and Development, Women and Children, Ethnic and Religion, Law and Public Policy, Local Government, Business Law and Disruption, Pengayoman

Law, Village Development and Communal Rights, and International and Human Rights. The conference was attended by national and international delegates from university academics, researchers, and practitioners. In total, there are 71 papers presented, with only 28 papers published.

Related with Kebijakan Pembangunan Wilayah Berbasis Pengelolaan Das:

- How To Delete Transaction History On Opay : [click here](#)